



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 23 Februari 2017

Halaman: 1

Becak Motor Minta Dilegalkan

JOGJA, BERNAS - Ratusan pengemudi becak motor memenuhi sisi timur Jalan Ipda Tut Harsono yang berada tepat di depan pintu masuk kompleks Balai Kota Yogyakarta untuk menggelar aksi menuntut legalisasi operasional becak motor.

"Tujuannya, ya untuk meminta agar becak motor itu dapat memiliki izin jalan. Kami itu sama-sama mencari rejeki dengan mengemudikan becak," kata Suranto, salah seorang peserta aksi, Rabu (22/2).

Menurut Suranto, peminat masyarakat terhadap becak motor terus meningkat karena becak motor memiliki keunggulan dari segi kecepatan dibanding becak kayu, sehingga penumpang lebih cepat sampai ke tujuan. "Banyak penumpang yang meminta diantar ke Stasiun Tugu. Jika menggunakan becak kayu bisa terlambat, sehingga mereka memilih menggunakan becak motor," katanya.

Suranto mengaku sebelum beralih menjadi pengemudi becak motor, ia bekerja menjadi pengemudi becak kayu selama 15 tahun. Becak kayu yang dimilikinya pun masih tersimpan di rumah.

"Dua tahun terakhir ini saya beralih men-

jadi pengemudi becak motor karena usia saya sudah tua. Sudah 53 tahun, sehingga kekuatan fisik berkurang," katanya.

Suranto yang sehari-hari beroperasi di sekitar Malioboro tersebut mengaku tidak takut terkena operasi penertiban yang dilakukan kepolisian. Jika ada pengemudi becak motor yang tertangkap operasi, maka biasanya melanggar lalu lintas.

"Jika kita mematuhi peraturan lalu lintas, maka tidak akan ditangkap polisi. Semua faktor keamanan pun saya penuhi. STNK dari sepeda motor masih berlaku, ada spion, rem tangan dan rem kaki," katanya.

Selama bekerja, lanjut Suranto, ia juga tetap menghormati dan menghargai pengemudi becak kayu sehingga memberikan kesempatan kepada calon penumpang untuk memilih becak yang dikehendaki. "Jika kami sama-sama menunggu penumpang, biasanya penumpang bisa memilih menggunakan becak motor atau kayu. Tidak dipaksakan memilih harus naik becak yang mana," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah DIY mencabut Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551.2/03/2003

► ke hal 7



HENDRA NUGRAHYA/BERNAS

DEMO BENTOR -- Sejumlah pengemudi becak motor (bentor) berkumpul di depan Balai Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta, Rabu (22/2). Aksi tersebut sebagai solidaritas mendukung perwakilan pengemudi bentor melakukan audiensi dengan pihak Pemkot terkait izin operasi bentor di Yogyakarta.

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Murni	☐ Amat Penting	☐ Untuk Ditanggapi

Becak Motor

Sambungan dari hal 1

tentang pelarangan becak motor, namun razia dari kepolisian masih tetap dilaksanakan karena kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Difasilitasi

Pada saat yang sama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) polemik keberadaan bentor (becak motor) di Kota Yogyakarta. FGD tersebut sebagai ajang dengar pendapat sekaligus mencari solusi terbaik.

Kepala Bidang (Kabid) Bappeda Kota Yogyakarta, Affrio Sunarno, mengatakan diskusi tersebut dimaksudkan untuk mendengar pendapat dari para pihak terkait keberadaan bentor ini. "Dengan acara seperti ini kita mencoba untuk duduk bersama mencari solusi terbaik," katanya.

FGD tersebut mengundang sejumlah narasumber terkait seperti dari Kepolisian, Dinas Perhubungan Pemda DIY, dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustal-UGM). Panitia juga turut mengundang beberapa perwakilan pelaku usaha bentor.

Berdasarkan data dari kepolisian, jumlah bentor di DIY telah mencapai angka 600 unit. Sementara untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri jumlah bentor mencapai 400 unit. Wilayah operasi bentor tersebut tersebar di tujuh titik, yakni Jl. Mangkubumi, Jl. Malioboro, Jl. Senopati, Jl. Sudirman, Jl. Solo, Jl. Godean, dan Jl. A Yani.

Affrio menjelaskan, inti permasalahan bentor ini adalah soal legalitas. Menurutnya, para pelaku bentor hanya butuh fasilitas teknis yuridis agar bentor memenuhi syarat sebagai moda transportasi yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping konsep desain bentor agar layak pakai.

"Pemkot siap memberikan fasilitas agar bentor ini menjadi moda transportasi yang layak dan laik. Layak berarti pantas dan patut, bahwa bentor sebagai moda transportasi, dan laik artinya bentor ini telah sesuai dengan syarat-syarat yuridis formal. Kami siap memberikan fasilitas untuk menyelesaikan masalah layak dan laik tersebut," ujar Affrio.

Affrio menyarankan, para pelaku bentor untuk membuat prototype bentor agar sesuai dengan regulasi. Menurut Affrio, bentor memang harus menyesuaikan peraturan yang ada, agar proses penegakan hukum juga bisa berjalan dan pelaku bentor juga bisa menjalankan pekerjaannya.

"Agar proses pembuatan prototype bentor ini sesuai standar, kami akan mengundang Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustal-UGM) dan pihak kepolisian untuk melakukan penilaian. Kami akan tawarkan langsung kepada para pelaku usaha bentor. Kami tetap melakukan monitoring dan evaluasi agar ke depan tidak timbul masalah baru," ujar Affrio.

Affrio memastikan, biaya pembuatan prototype akan ditanggung Pemerintah Kota. Pihaknya juga menawarkan langsung kepada ketua paguyuban bentor Yogyakarta untuk membuat prototype bentor.

Affrio juga meminta kepada para pelaku usaha bentor untuk terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait dan tetap mematuhi peraturan. "Saya tidak ingin diskusi ini hanya berujung wacana saja, harus ada solusi teknisnya," katanya.

(ant/m3)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005